

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan wilayah merupakan satu dari berbagai permasalahan yang banyak terjadi di negara-negara berkembang dalam proses pembangunannya. Menurut Ratnasari dan Santoso (2014), ketimpangan wilayah dapat diartikan sebagai keadaan dimana tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah itu berbeda. Perbedaan ini dapat mengakibatkan stabilitas keamanan suatu wilayah terganggu sebagai akibat dari adanya kecemburuan sosial antar masyarakat terutama dari kalangan dengan tingkat kesejahteraannya yang lebih rendah (Bappenas, 2018).

Pembahasan terkait pembangunan dan ketimpangan sendiri sudah sejak lama dibicarakan oleh para ahli ekonomi, seperti halnya Kuznets (1955) yang dimana dalam teorinya mengatakan bahwa hubungan antara pembangunan dan ketimpangan itu membentuk seperti U-terbalik (*inverted U-curve*), dimana pada masa awal pembangunan, ketimpangan yang melebar merupakan hal yang lumrah terjadi akibat konsekuensi dari pembangunan. Setelahnya, pada titik tertentu ketimpangan tersebut akan semakin menurun persentasenya seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin membaik sebagai bentuk keberhasilan dari suatu pembangunan.

Ketimpangan pembangunan merupakan permasalahan yang tak dapat diabaikan adanya yang apabila tidak ditanggapi dengan serius maka akan menimbulkan krisis yang semakin kompleks seperti masalah pendudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks



makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah (Adhiani, dkk 2018).

Tujuan dari suatu pembangunan tidak selalu hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita saja namun juga harus diperhatikan cara agar proses pemerataan dan distribusi nilai tambah tertentu dalam kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dapat terjadi (Kuncoro, 2015). Namun permasalahannya saat ini tidak hanya pada bagaimana meningkatkan pendapatan tersebut, tetapi siapa yang akan meningkatkannya, sebagian kecil masyarakat atau semua kalangan masyarakat. Myrdal (dalam Jhingan, 2014), mengutarakan bahwasanya pembangunan ekonomi dapat menimbulkan suatu proses sebab-akibat sirkuler sehingga si kaya semakin kaya dengan mendapat keuntungan yang semakin besar, dan si miskin akan semakin tertinggal. Dengan begitu dampak balik (*backwash effects*) akan semakin besar dan dampak sebar (*spread effects*) semakin mengecil yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan yang terjadi.

Sebagai negara dengan wilayah dan penduduk yang cukup besar di dunia, Indonesia pun tidak luput dari masalah ketimpangan ini. Meratakan pembangunan ke seluruh penjuru wilayah merupakan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Seperti halnya di Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia tidak lepas dari permasalahan tersebut. Di wilayah ini terdapat lima provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun konsentrasi perekonomiannya yang berbeda membuat jumlah produksi



yang dihasilkan oleh tiap wilayah ini pun berbeda yang kemudian akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh oleh penduduknya. Adapun perbedaan yang sangat nampak dari segi PDRB per kapita di wilayah tersebut disajikan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2019-2023 (ribu rupiah)

Provinsi	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023*	
Kalimantan Barat	27,199.78	24,953.61	25,793.51	26,734.57	27,560.34	26,448.36
Kalimantan Tengah	37,870.47	37,148.73	37,955.03	39,856.48	40,959.59	38,758.06
Kalimantan Selatan	31,611.46	32,212.30	32,894.85	34,132.71	35,342.10	33,238.68
Kalimantan Timur	134,410.55	125,764.53	127,368.07	131,238.63	137,510.39	131,258.43
Kalimantan Utara	88,299.52	86,823.59	88,973.51	92,392.97	95,638.09	90,425.54
Kalimantan	63,878.36	61,380.55	62,596.99	64,871.07	67,402.10	64,025.82

Keterangan: * = Angka Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Secara umum, PDRB per kapita atau pendapatan per kapita ini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, dimana semakin besar angka PDRB per kapita wilayah tersebut bermakna semakin sejahtera pula penduduknya (Sukirno, 2004).

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa dari lima provinsi yang terdapat di Pulau Kalimantan, hanya dua provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di atas rata-rata wilayah, yaitu Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp131,25 juta dan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp90,42 juta. Sementara itu, tiga provinsi lainnya, yakni Kalimantan Tengah (Rp38,75 juta), Kalimantan Selatan (Rp33,23 juta), dan Kalimantan Barat (Rp26,44 juta), memiliki PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita Pulau Kalimantan yang tercatat sebesar Rp64,02 juta.

Ketimpangan ini mengindikasikan masih adanya disparitas



kesejahteraan antarwilayah di Pulau Kalimantan. Perbedaan tingkat pendapatan yang cukup signifikan, di mana PDRB per kapita Kalimantan Timur hampir lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Barat, mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi hasil pembangunan. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator kuat bahwa ketimpangan wilayah masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Pulau Kalimantan.

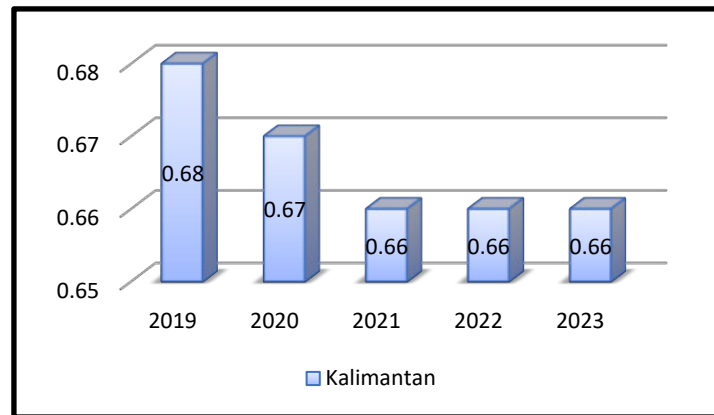
Arah kebijakan pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sendiri telah ditetapkan bahwa tujuh Wilayah Pembangunan (WP) di Indonesia itu mencakup: WP Sumatera, WP Jawa-Bali, WP Nusa Tenggara, WP Kalimantan, WP Sulawesi, WP Maluku, dan WP Papua.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah menggunakan Indeks Williamson (IW) sebagai ukuran ketimpangan regional, Pulau Kalimantan tergolong sebagai wilayah pembangunan dengan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 0,67. Namun demikian, sepanjang periode 2019–2023 terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat ketimpangan, sebagaimana tercermin dari pergeseran nilai IW yang semula 0,68 pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi 0,67 pada tahun 2020, dan selanjutnya stabil pada angka 0,66 selama kurun 2021–2023. Penurunan angka indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pembangunan ekonomi antarprovinsi di Kalimantan, meskipun

mpangan yang terjadi masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan wilayah tetap menjadi isu strategis di



Pulau Kalimantan, sehingga diperlukan analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhinya.



Sumber: BPS, data diolah

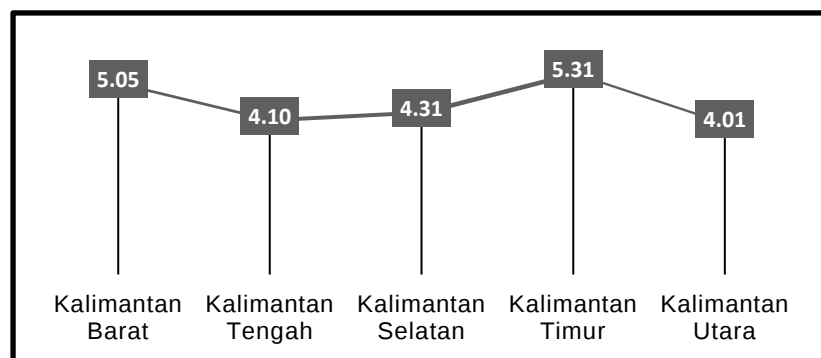
Gambar 1.1 Indeks Williamson Pulau Kalimantan Tahun 2019-2023

Sjafrizal (2008) mengemukakan bahwasanya ketimpangan wilayah dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya perbedaan kondisi demografis, alokasi dana, perbedaan sumber daya alam, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa serta konsentrasi ekonomi yang berbeda mengakibatkan satu daerah lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Karena perbedaan ini, kemampuan suatu wilayah dalam proses pembangunan juga berbeda, sehingga tidak mengherankan bahwa di suatu daerah, secara umum, ada yang lebih maju (*developed region*) dan terbelakang (*underdeveloped region*). Kesenjangan dalam pembangunan juga dapat diamati secara vertikal, yaitu perbedaan dalam distribusi pendapatan dan horizontal, khususnya perbedaan antara daerah yang lebih maju dan tertinggal (Sjafrizal, 2008).

Faktor demografis sendiri membahas terkait kependudukan dan tenaga kerja dalam suatu wilayah yang salah satu di dalamnya mencakup tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan



persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan (BPS, 2020). Masalah pengangguran dalam pembangunan adalah hal yang umum dan menjadi permasalahan jangka panjang yang sampai saat ini penanganannya masih terus diusahakan oleh pemerintah.



Sumber: Statistik Indonesia 2024, data diolah

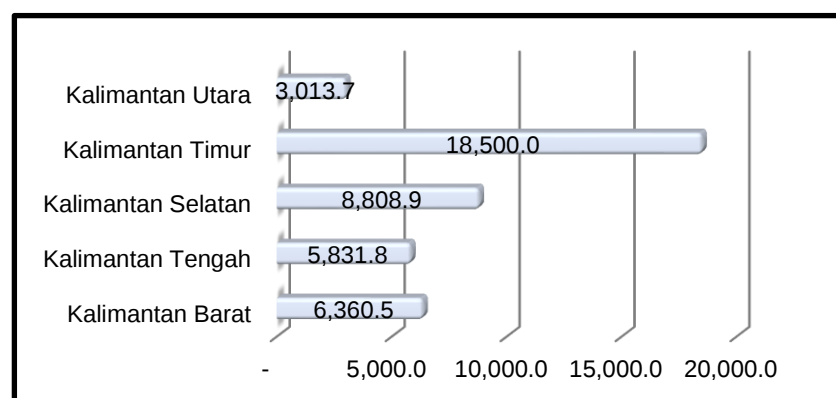
Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi Di Pulau Kalimantan Tahun 2023 (Persen)

Data diatas menunjukkan bahwa Kalimantan Timur (5,31 persen) dan Kalimantan Barat (5,05 persen) merupakan wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Kalimantan sedangkan yang terendah ialah Kalimantan Utara diangka 4,01 persen. Dari angka tersebut, dapat dilihat bahwa pembangunan yang dilakukan tiap wilayah tersebut berbeda sehingga kemampuan dalam menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja pun berbeda. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan berarti mereka tidak mempunyai pendapatan untuk menopang kehidupannya sehari-hari. Hal tersebut tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi sebab daya beli masyarakat akan menurun akibatnya ketimpangan akan meningkat dan masyarakat jauh dari kata sejahtera.

Selain faktor demografis, alokasi dana pembangunan daerah juga



menjadi faktor penentu dari ketimpangan itu sendiri. Alokasi dana ini merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan. Pengeluaran yang dilakukan dapat tertuju pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan demi pemerataan di tiap wilayah. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, data diolah

Gambar 1.3 Realisasi Belanja Daerah Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2023 (miliar rupiah)

Data realisasi diatas menunjukkan bahwa Kalimantan Timur

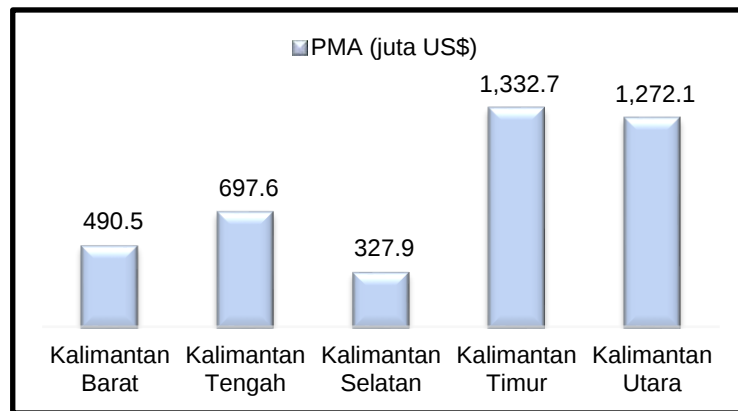


merupakan wilayah dengan realisasi belanja daerah tertinggi sebesar 18,5 triliun rupiah diikuti Kalimantan Selatan (8,8 triliun rupiah), Kalimantan Barat (6,3 triliun rupiah), Kalimantan Tengah (5,8 triliun rupiah) dan terendah Kalimantan Utara sebesar 3,01 triliun rupiah. Menurut Jhingan (2007), pengeluaran pemerintah cenderung mengurangi dampak dari perbedaan yang ada dimana pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi, hal ini tentunya juga harus sejalan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, menyebarkan dan mendistribusikan pekerjaan yang menyerap banyak pekerja untuk meningkatkan kualitas industrialisasi yang juga akan berdampak ke daerah yang terbelakang untuk mengembangkan dan meminimalkan kesenjangan yang terjadi.

Infrastruktur yang baik dan memadai merupakan penentu bagi para investor untuk melakukan investasi di wilayah tersebut. Investasi sangat penting adanya dalam proses pembangunan. Investasi sendiri terbagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan oleh swasta dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi disini berperan dalam meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah yang pada akhirnya Produk Domestik Regional Bruto pun meningkat yang secara langsung berpengaruh pada pendapatan yang diterima masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi salah satunya juga ditentukan oleh investasi, karena selain mendorong kenaikan *output* secara signifikan, investasi pun akan meningkatkan permintaan *input* yang selanjutnya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan



pendapatan yang diperoleh (Suindyah, 2011).



Sumber: Statistik Indonesia 2024, data diolah

Gambar 1.4 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2023 (Juta US\$)

Data investasi tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Timur (1,2 miliar US\$) merupakan wilayah dengan realisasi investasi PMA tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan Kalimantan Timur merupakan pusat penambangan sumber daya energi seperti batu bara, minyak bumi dan lain sebagainya kemudian Kalimantan Utara dengan realisasi investasi sebesar 1,2 miliar US\$ dan wilayah dengan realisasi investasi asing terendah ialah Kalimantan Selatan hanya di angka 327 juta US\$. Investasi yang terpusat di wilayah tertentu dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena kesempatan yang diperoleh berbeda untuk memungkinkan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tiap wilayah.

Dengan demikian, sinergi antara belanja daerah dan investasi dalam alokasi dana pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penekanan tingkat pengangguran menjadi poin bagi pemerintah setempat dalam menangani masalah ketimpangan wilayah untuk mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan



masyarakat.

Berbagai studi terdahulu pun telah membahas permasalahan ketimpangan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dkk. (2024) yang mengkaji ketimpangan pendapatan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil sebagai alat analisis untuk mengukur tingkat ketimpangan. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengungkap secara mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya ketimpangan di wilayah tersebut dan penelitian ini hanya terfokus pada wilayah Sumatera saja terkhusus Sumatera Utara, sehingga memberikan ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memandang penting untuk mengangkat isu ketimpangan wilayah dalam hal ini di Pulau Kalimantan yang memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi geografis, ekonomi, maupun sosial, yang dapat memengaruhi tingkat ketimpangan antarwilayah di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan wilayah di Pulau Kalimantan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi empiris dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, adapun judul dari penelitian ini ialah **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Pulau Kalimantan”**.

1.2 Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah utama dari penelitian ini ialah perbedaan kondisi demografis berupa tingkat

pengangguran dan alokasi dana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang dicerminkan melalui realisasi belanja daerah berupa belanja modal serta investasi dalam hal ini Penanaman Modal Asing (PMA) yang berbeda menyebabkan ketimpangan antar wilayah yang pada akhirnya ada daerah maju dan daerah tertinggal. Adapun pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Kalimantan?
2. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Kalimantan?
3. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Kalimantan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Kalimantan.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Kalimantan.
3. untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Kalimantan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah dan cara mengukur ketimpangan wilayah itu sendiri.



2. Sebagai informasi kepada pembaca dan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan agar dapat mengambil kebijakan yang tepat dan pada akhirnya dapat mengurangi atau mengendalikan tingkat ketimpangan di Pulau Kalimantan.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran dan sebagai masukan untuk penelitian berikutnya yang serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada peningkatan dalam produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat yang diiringi dengan peningkatan pendapatan. Adapun *region/wilayah* yang dimaksud disini dapat berupa provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa maupun suatu kelompok negara seperti ASEAN.

Sering kali pertumbuhan ekonomi dijadikan acuan bahwa ketimpangan sudah dapat teratasi, namun kenyataanya tidak seperti itu. Menurut Arsyad (2010), hanya sedikit dari manfaat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk miskin dan masih banyak diantaranya dengan kondisi ekonomi dibawah standar kebutuhannya. Di sisi lain, penduduk yang sudah kaya justru lebih banyak menerima manfaat dari pertumbuhan tersebut. Kondisi ini disebut "*trickle down effect*" atau penyerapan ke bawah dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi.

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah menurut teori ini ialah keuntungan lokasi, aglomerasi dan arus lalu lintas modal. Faktor-faktor ini kemudian dibahas lebih lanjut dalam model pertumbuhan ekonomi regional. Menurut Sjafrizal (2008), terdapat empat

s model yang membahas terkait faktor penentu pertumbuhan ekonomi
ional, adalah sebagai berikut:



1. Model Basis Ekspor

Douglas C. North pertama kali mengembangkan model ini pada tahun 1956 dalam bukunya "*Location Theory and Regional Economic Growth*" yang mana dijelaskan bahwa permintaan produk regional berupa barang dan jasa dari luar wilayah merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor yang mampu memenuhi kebutuhan di dalam wilayah yang kemudian juga dapat mengekspor hasil dari sektor tersebut ke wilayah lain disebut basis. Dengan adanya sektor basis yang diekspor, pertumbuhan ekonomi regional akan meningkat sebagai dampak dari *multiplier effect*. Produk yang diekspor dari basis sektor ini akan merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya, sehingga pendapatan daerah meningkat dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat yang kemudian berkontribusi pada peningkatan ekonomi regional.

2. Model pertumbuhan interregional

Model ini diperkenalkan oleh Harry W. Richardson pada tahun 1978 yang mana model ini merupakan perluasan dari model basis ekspor. Jika model basis ekspor hanya memperhatikan daerahnya sendiri tanpa mempertimbangkan dampak dari daerah lainnya yang terkait, maka model pertumbuhan interregional ini justru mempertimbangkan dampak dari daerah lain. Dengan demikian keunggulan model ini tidak hanya berfokus pada ekspor sebagai indikator dalam menghitung pendapatan daerah, tetapi pengeluaran pemerintah dan investasi juga masuk dalam perhitungan. Karena, dalam ruang lingkup regional, pertumbuhan ekonomi satu wilayah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah lain di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui



pertumbuhan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, perlu diterapkan model pertumbuhan interregional.

3. Model pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari Amerika Serikat dan TW. Swan (1956) dari Australia. Menurut teori ini, terdapat tiga sumber pertumbuhan diantaranya akumulasi modal, peningkatan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teori ini mengatakan bahwa agar perekonomian bisa tumbuh dengan maksimal maka kondisi perekonomian harus diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Selain itu juga diperlukan suatu tingkat *saving* yang pas dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali di wilayah yang bersangkutan. Kemampuan daerah untuk meningkatkan aktivitas produksi, potensi lokal, perputaran tenaga kerja, dan proses urbanisasi antar wilayah adalah faktor yang menentukan pertumbuhan regional.

4. Model *Circular Cumulative Causation*

Model yang dipelopori oleh Nikolas Kaldor ini mengkritik model pertumbuhan neo klasik yang menyatakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bisa maksimal dengan mekanisme pasar padahal pada kenyataannya kekuatan pasar justru cenderung memperparah tingkat kesenjangan daerah-daerah sekitar daerah maju. Sehingga menurut model ini, peran pemerintah sangat penting dalam melakukan pemerataan pembangunan melalui program-program yang dilaksanakan. Karena jika hanya mengandalkan mekanisme pasar, pertumbuhan ekonomi mungkin akan terus meningkat tetapi tidak dengan mengatasi ketimpangan yang ada.



2.1.2 Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dijelaskan dengan menggunakan hipotesis Neoklasik yang dikemukakan oleh Douglas C North. Menurut teori ini, ketika suatu negara sedang dalam tahap awal pembangunan, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat (Sjafrizal, 2008). Sampai ketimpangan mencapai puncaknya, proses ini akan berlanjut. Selanjutnya, perbedaan pembangunan di antara wilayah-wilayah tersebut akan secara bertahap berkurang jika pembangunan terus dilakukan (Nurhuda, 2013). Dari hipotesa ini dikatakan bahwa pada negara-negara sedang berkembang, ketimpangan pembangunan antar wilayah itu cenderung lebih tinggi sedangkan di negara maju ketimpangan tersebut akan lebih rendah.

Selain teori Neoklasik, Myrdal dalam bukunya *Economic Theory and Underdeveloped Region* (1957) juga menjelaskan teori lain yakni sebuah konsep yang dikenal sebagai kumulatif kausatif. Dimana menurut teori ini ketimpangan suatu daerah terjadi karena adanya konsentrasi ekonomi yang terbilang tinggi di suatu wilayah yang mana akan membuat daerah belakangnya menerima dampak yang kurang baik. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah dikarenakan adanya *backwash effect* yang mendominasi *spread effect* yang mana semakin kumulatif kecenderungan tersebut maka akan semakin buruk pula ketimpangan regionalnya.

Backwash effect berarti bahwa semua perubahan yang sifatnya merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di wilayah terkait itu karena sebab-sebab di luar dari wilayah tersebut (Jhingan, 2012). Perkembangan



suatu wilayah yang merugikan wilayah lain yang mengalami stagnan akan semakin memperburuk ketimpangan regional. Myrdal mengatakan bahwa kemampuan daerah terbelakang untuk berkembang terbilang rendah jika dibandingkan dengan daerah maju yang diakibatkan karena adanya *backwash effect* sehingga daerah terbelakang tersebut mengalami banyak kendala dalam mengembangkan perekonomiannya. Sebaliknya, *spread effect* merujuk pada keadaan dimana pembangunan menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke daerah-daerah lainnya (Jhingan, 2012).

Apabila *backwash effect* lebih besar dibandingkan *spread effect* ini berarti bahwa terdapat masalah dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa secara menyeluruh ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh daerah maju justru menghambat pembangunan daerah miskin sehingga kesenjangan antar wilayah semakin melebar.

Pada dasarnya, ketimpangan dalam pembangunan suatu wilayah tidak dapat dihilangkan. Satu sisi, ketimpangan akan mendorong daerah yang terbelakang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu, adapun juga efek negatif dari semakin tingginya ketimpangan antar wilayah ini termasuk ketimpangan yang tinggi, inefisiensi ekonomi, dan penurunan stabilitas dan solidaritas sosial (Todaro, 2006).

Ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut Sjafrizal (2012), faktor penyebab utama terjadinya ketimpangan ini adalah sebagai berikut:



1. Perbedaan Sumber Daya Alam

Dalam kegiatan produksi, komposisi sumber daya alam berperan sebagai faktor produksi. Dengan adanya perbedaan tersebut, daerah dengan kandungan sumber daya alam yang melimpah mampu memproduksi berbagai macam barang kebutuhan dalam jumlah yang besar dengan biaya yang kecil. Masyarakat di suatu daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang melimpah menjadi makmur karena harga barang menjadi lebih murah. Di daerah dengan sedikit sumber daya alam, sulit untuk mendapatkan faktor produksi dan akhirnya memproduksi barang dengan biaya yang lebih tinggi dengan jumlah produksi yang lebih kecil, yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap hingga daerah maju. Oleh karena itu, ketidaksamaan yang disebabkan oleh perbedaan yang berbeda dalam kepemilikan sumber daya alam terus terjadi.

2. Perbedaan Kondisi Kependudukan (Demografis)

Kualitas kependudukan dan sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja di suatu daerah. Ini akan meningkatkan investasi, yang pada gilirannya akan menambah lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Akibatnya, ekonomi negara berkembang dengan cepat. Faktor penyebab ketimpangan dalam kondisi demografis adalah distribusi pelayanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, ketimpangan pembangunan disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat kemandirian



dan pembangunan sumber daya manusia, tingkah laku, kebiasaan, dan etos kerja.

3. Terhambatnya Aliran Barang dan Jasa

Kegiatan perdagangan barang dan jasa serta migrasi akan terhambat jika aliran barang dan jasa tidak berjalan dengan baik. Komoditas yang berlebihan membuat perdagangan sulit dilakukan di luar wilayah yang lebih membutuhkan. Hasil dari peningkatan kebutuhan barang dan jasa di wilayah yang aliran barang dan jasanya terhambat, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak merata.

4. Terpusatnya Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu saja akan menyebabkan ketimpangan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di wilayah yang menjadi konsentrasi kegiatan ekonomi dibandingkan dengan wilayah yang bukan menjadi konsentrasi kegiatan ekonomi. Konsentrasi kegiatan ekonomi juga akan menghasilkan peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya akan mendorong proses pembangunan. Sumber daya yang melimpah, tanah yang subur, dan sarana transportasi yang lengkap membuat daerah ini menjadi pusat ekonomi.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Pemerataan ekonomi seharusnya dihasilkan dari pemindahan fiskal ke daerah otonom. Namun, kucuran dana yang berasal dari investasi adalah komponen yang menyebabkan ketidaksesuaian. Perusahaan swasta yang mengutamakan keuntungan lebih suka



berinvestasi di daerah yang lebih maju daripada daerah yang lebih terbelakang. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investor swasta dan asing untuk berinvestasi di daerah tersebut termasuk aksesibilitas transportasi dan bahan baku, sumber daya yang melimpah, tarif sewa properti, infrastruktur yang baik dan lengkap, dan konsentrasi pasar.

2.1.3 Indeks Williamson

Istilah Indeks Williamson muncul setelah Jeffrey G. Williamson sebagai pencetusnya menggunakan alat analisis ini untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis Neoklasik terkait proses pembangunan dan ketimpangan antar wilayah. Dimana pada tahun 1966 Williamson melakukan studi terkait ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang menggunakan data *time series* dan *crossection*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Neoklasik secara teoritik terbukti bahwa dalam proses pembangunan suatu negara tidak serta merta langsung menurunkan ketimpangan antar wilayah, tetapi sebaliknya ketimpangan tersebut akan tergolong tinggi (Sjafrizal, 2012).

Dibandingkan dengan gini rasio yang biasa digunakan untuk menghitung distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, Indeks Williamson menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk. Ini karena yang diperbandingkan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, tetapi tingkat pembangunan antar daerah (Sjafrizal, 2018).



Model atau formasi dari indeks Williamson yaitu:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}}$$

Di mana Y_i adalah PDRB per kapita daerah i , Y adalah PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah, f_i adalah jumlah penduduk daerah i , dan n adalah jumlah total penduduk daerah i . Hasil perhitungan angka indeks akan bergerak dari nol hingga satu, dengan asumsi bahwa jika IV mendekati satu, itu berarti sangat timpang, dan jika mendekati nol, itu berarti sangat merata (Sjafrizal, 2018).

2.1.4 Tingkat Pengangguran

Sebagaimana dinyatakan oleh Simanjutak (1985) dalam Dhyatmika (2013), penganggur adalah individu yang sama sekali tidak bekerja atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Menurut Sukirno (2010), pengangguran tidak berarti seseorang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan. Sebaliknya, pengangguran berarti seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi tidak dapat melakukannya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Menurut Sukirno (2010), pengangguran dapat dibagi menjadi empat berdasarkan ciri-cirinya, yaitu:



1. Pengangguran Terbuka

Kondisi dimana tidak ada keseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan dan menyebabkan ada orang yang tidak memiliki pekerjaan inilah disebut pengangguran terbuka. Seseorang juga akan menganggur dalam waktu yang lama karena jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat dan kurangnya lowongan pekerjaan. Karena pertumbuhan industri yang menurun dapat menyebabkan pengangguran terbuka, ada penurunan dalam kegiatan perekonomian.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi terjadi dimana jumlah tenaga kerja dalam satu unit pekerjaan terlalu banyak sedangkan dengan mengurangi tenaga kerja pada jumlah tertentu tidak akan menyebabkan jumlah produksi berkurang. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan seseorang yang berkerja tidak efektif dan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya yang pada akhirnya berpengaruh pada produktivitasnya tidak optimal.

3. Setengah Menanggur

Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memiliki pekerjaan tetap disebut setengah menganggur. Mereka mungkin bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau 7 jam per hari. Seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaannya di suatu proyek dan kemudian menganggur sambil menunggu proyek berikutnya adalah contohnya.



4. Pengangguran Musiman

Ciri dari pengangguran ini dapat ditemukan di sektor pertanian dan perikanan, yang pada setiap pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu hingga di luar dari waktu tersebut mereka akan menganggur.

2.1.5 Belanja Daerah

a. Hukum Wagner

Teori Wegner menekankan peningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap GNP. Menurut teori ini, oleh karena pendapatan per kapita meningkat, pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, terutama karena pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur hubungan masyarakat, hukum, pendidikan, dll.

Ekonom yang setuju dengan pendapat Wagner berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah yang tinggi menimbulkan masalah dalam hal penyelenggaraan dana untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran, yang mana ini dapat dicapai dengan meningkatkan pajak, menambah utang, atau dengan mencetak uang baru. Masing-masing dari opsi ini dapat menimbulkan masalah. Pajak dapat mengubah perekonomian, menambah utang dapat mendorong investasi swasta keluar, dan mencetak uang terlalu banyak dapat menyebabkan inflasi (Dada, 2017).

b. Keynes

Menurut teori Keynes, pengeluaran pemerintah adalah salah satu komponen permintaan agregat. Identitas pendapatan nasional adalah formula perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran: $Y = C + I + G + X - M$. Variabel di ruas kanan disebut



permintaan agregat, dan variabel Y menunjukkan pendapatan nasional dan juga penawaran agregat. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional, ini dapat membandingkan nilai G terhadap Y dan melihat perubahannya dari waktu ke waktu (Dumairy dalam Anitasari dan Soleh, 2015).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal harus diterapkan. Kebijakan fiskal salah satunya melibatkan pengeluaran pemerintah. Angka pengganda pengeluaran adalah alat untuk menggambarkan dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka ini menunjukkan seberapa besar kelipatan pertambahan output nasional jika pengeluaran pemerintah atau investasi meningkat (Keynes dalam Mankiw, 2010).

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian disebut sebagai pengeluaran pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri merupakan bagian dari pengeluaran tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membagi belanja pemerintah berdasarkan fungsinya menjadi 9 fungsi: 1) pelayanan umum, 2) ketertiban dan keamanan, 3) ekonomi, 4) pelestarian lingkungan hidup, 5) perumahan dan fasilitas umum, 6) kesehatan, 7) pariwisata, 8) pendidikan, dan 9) perlindungan sosial.

Belanja publik yang efisien dan tepat sasaran untuk pendidikan, atihan kejuruan dan kewirausahaan, serta layanan kesehatan dasar



merupakan sarana untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Odusola, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, belanja daerah dikelompokkan ke dalam beberapa jenis pengeluaran, yaitu:

1. **Belanja Operasional**, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menunjang aktivitas rutin dan operasional pemerintahan daerah. Jenis belanja ini mencakup pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, pembayaran bunga, pemberian subsidi, hibah, serta bantuan sosial kepada masyarakat.
2. **Belanja Modal**, yaitu pengeluaran yang dimanfaatkan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Contohnya meliputi pengadaan tanah, peralatan, bangunan, jalan, jaringan irigasi, dan infrastruktur lain yang mendukung pelayanan publik.
3. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk kebutuhan yang bersifat darurat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan bencana alam, keadaan darurat, atau peristiwa luar biasa lainnya.
4. **Belanja Transfer**, yaitu pengeluaran pemerintah daerah yang dialirkan kepada pemerintah desa atau lembaga lain yang penerimaannya telah diatur dan bersifat wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pasal 50 dan 53 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan sebagai

penyempurnaan dan pengganti Permendagri No. 13 Tahun 2006 diatur bahwa pengelolaan belanja daerah harus berfokus pada pencapaian hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, setiap pengeluaran daerah diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.

Menurut Sukirno (2016), pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal berperan sebagai bentuk investasi yang mampu memperbesar akumulasi aset fisik daerah. Melalui pembangunan infrastruktur dan sarana ekonomi, belanja modal dapat menekan biaya distribusi dan logistik, mendorong terbukanya lapangan kerja baru, serta memacu pertumbuhan ekonomi regional dengan lebih cepat dan merata.

2.1.6 Penanaman Modal Asing (PMA)

Aktivitas penanaman modal merupakan aktivitas untuk memasukkan modal atau investasi yang tujuannya untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi di wilayah tertentu. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan modal oleh perusahaan atau entitas lain guna membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2010).

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa pembentukan investasi merupakan komponen penting yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi yang dilakukan oleh pengusaha, individu maupun pemerintah melibatkan penanaman modal atau pembelian sejumlah barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi barang dan jasa di masa depan. Selain meningkatkan faktor



produksi, investasi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menekan angka pengangguran.

Investasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu investasi yang dilakukan oleh swasta berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Investasi adalah salah satu komponen dari PDB dengan rumus $PDB = C + I + G + (X - M)$. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi *nonresidential* mencakup peralatan dan sarana yang digunakan selama proses produksi dan investasi *residential* berupa pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggali oleh pemilik maupun yang akan disewakan kembali. Investasi sendiri merupakan suatu fungsi dari pendapatan dan tingkat bunga jika dilihat dari keterkaitannya ($I = (Y, i)$), dimana pertambahan suatu pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dan tingkat bunga yang tinggi akan menurunkan minat untuk berinvestasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 Ayat 9 yang membahas terkait Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal dengan tujuan untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri.

Jika suatu negara memiliki ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan arus investasi ke dalamnya yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan, investasi ini akan meningkatkan penawaran melalui stok modal yang ada. Selanjutnya peningkatan stok modal ini juga



akan berpengaruh ke kemampuan masyarakat untuk menghasilkan *output* atau melakukan kegiatan produksi yang semakin meningkat yang akan membuat aktivitas perekonomian negara tersebut tinggi.

Dengan adanya aktivitas Penanaman Modal Asing berarti juga terdapat proses transfer pengetahuan dan teknologi, peningkatan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor dan devisa. Negara-negara yang melakukan investasi ke suatu wilayah tentunya akan memaksimalkan dan memastikan bahwa proses produksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan ini dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi yang canggih dan pengetahuan dalam pengelolaannya. Jika *output* yang dihasilkan lebih besar maka pendapatan pun akan meningkat sehingga dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Investasi yang mampu mendorong peningkatan produksi barang dan jasa yang dapat diekspor akan meningkatkan pendapatan dalam mata uang asing yang pada gilirannya akan memperkuat cadangan devisa negara dan perekonomian secara keseluruhan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Ketimpangan Wilayah

Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah sangat terkait dengan kondisi demografi. Seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi tidak dapat melakukannya disebut pengangguran. Seperti yang dinyatakan oleh Sjafrizal (2012), perbedaan kondisi demografis adalah salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan di antara wilayah. Di sini, demografi meliputi perbedaan dalam struktur



kependudukan dan tingkat pertumbuhan, perbedaan dalam pendidikan dan kesehatan, dan perbedaan dalam kondisi ketenagakerjaan, termasuk tingkat pengangguran. Produksi kerja yang lebih tinggi akan datang dari daerah dengan kondisi demografis yang baik, yang akan mendorong investasi lebih banyak ke daerah tersebut.

Hal ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zusanti, dkk (2020) dan Sinik dan Robertus (2023) dimana dalam penelitian mereka dinyatakan bahwa ketimpangan regional akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka.

2.2.2 Hubungan Belanja Daerah dengan Ketimpangan Wilayah

Belanja daerah yang ditunjukkan oleh peran pemerintah, berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin banyak pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja daerah dalam bentuk belanja modal maka akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. Belanja daerah terkhususnya belanja modal dapat mendorong perekonomian melalui program atau kegiatan yang meningkatkan produktivitas sumber daya yang ada, dengan begitu akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan.

2.2.3 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan Ketimpangan Wilayah

Secara teori, Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi yang pada akhirnya memengaruhi ketimpangan wilayah terkhusus di negara tujuan investasi melalui beberapa cara. Pertama, dengan pembangunan pabrik-pabrik baru yang akan menambah *output* atau PDB, total ekspor dan



kesempatan kerja yang akan berdampak langsung ke pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Dengan meningkatnya total ekspor berarti ada tambahan cadangan devisa yang akan meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk membayar utang luar negeri dan impor. Kedua, cara yang secara tidak langsung berpengaruh adalah dengan adanya tambahan permintaan di dalam negeri untuk barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya dari pabrik yang dibangun. Jika permintaan ini sepenuhnya di penuhi oleh sektor-sektor dalam negeri, maka secara tidak langsung dampak positif dari keberadaan pabrik-pabrik baru tersebut dapat dinikmati oleh sektor-sektor domestik lainnya dengan mengalami pertumbuhan. Ketiga, meningkatnya peluang kerja masyarakat dengan keberadaan pabrik-pabrik tersebut yang berdampak positif terhadap perekonomian domestik melalui sisi permintaan, dimana peningkatan kesempatan kerja berarti kemampuan belanja masyarakat ikut meningkat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri. Jika dampak investasi ini dirasakan oleh masyarakat secara luas maka ketimpangan wilayah akan merata dengan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.

2.3 Studi Empiris

Penelitian oleh Fahma dan Hendarto dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2020” yang dilakukan pada tahun 2024 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh tiap-tiap variabel independen



(investasi, Aglomerasi, tingkat pengangguran, distribusi PDRB sektor primer, dan panjang jalan) secara bersama-sama dapat mempengaruhi ketimpangan dari kedua wilayah tersebut secara signifikan.

Kemudian ada studi "Ketimpangan Pembangunan di Sulawesi Barat" yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Endriady Edy Abidin dan Ahmad Amiruddin dimana hasil akhir penelitiannya menunjukkan Indeks Williamson Sulawesi Barat berada dalam kategori sedang ($0,35 < IW < 0,5$) dan perbedaan dalam kondisi geografis, SDA, dan SDM adalah penyebab ketimpangan tersebut.

Selanjutnya, penelitian dengan judul "Analisis Ketimpangan Wilayah" oleh Mohammad Irkham tahun 2019 dengan lokasi penelitian di Provinsi Banten. Ia menggunakan Indeks Theil dan Indeks Williamson sebagai tolak ukur ketimpangan dan Tipologi Klassen untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan tingkat pertumbuhannya. Hasilnya menunjukkan bahwa Kota Cilegon dan Kota Tangerang merupakan wilayah dengan angka ketimpangan tertinggi di Banten yang disebabkan oleh hasil produksi barang dan jasa dari pabrik-pabrik yang dimiliki oleh pihak PMA dibawa keluar dari kedua wilayah tersebut sehingga penyebarannya tidak merata. Disisi lain, SDM lokal yang bekerja di skala manajer ke atas kurang memadai sehingga lebih banyak bekerja pada tingkatan yang lebih rendah.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Zheng L, dkk pada tahun 2021 yang berjudul "*Variation In the Determinants of Regional Development Disparities In Rural China*" dengan menggunakan data panel 30 provinsi di China yang memuat pertumbuhan *output* industri pedesaan



dan pertumbuhan ekspor industri pedesaan sebagai variabel dependen dan input modal fisik (PMDN dan PMA), input modal manusia (produktivitas tenaga kerja dan *human capital*), serta variabel kontrol (ukuran perusahaan, efek aglomerasi, biaya tenaga kerja, dummy lokasi dan dummy privatisasi) sebagai variabel independen. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa provinsi di wilayah timur China mendominasi *output* (76 persen) dan ekspor (93 persen) industri pedesaan pada 2014, sementara provinsi di wilayah barat merupakan wilayah tertinggal dengan 8 persen *output* dan 2 persen ekspor.

Terakhir, studi oleh Cahyani, dkk (2024) berjudul “*Regional Inequality Among Districts In North Sumatra Province*”, yang menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil sebagai alat ukur ketimpangan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Dikatakan dalam penelitian ini bahwa penyebab ketimpangan di Sumatera ialah perbedaan karakteristik tiap daerah sehingga pola pembangunan yang dilaksanakan pun berbeda menyebabkan perbedaan dalam tingkat PDRB per kapitanya.

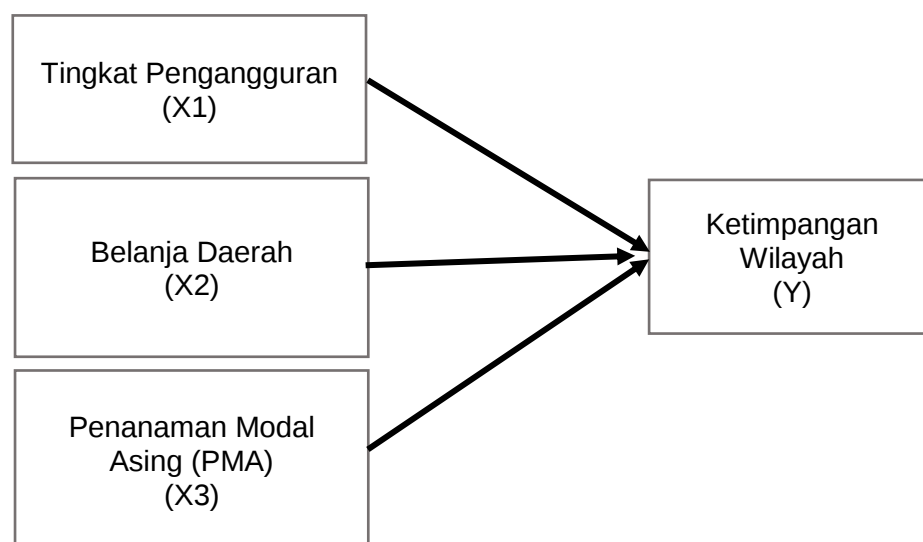
2.4 Kerangka Konseptual

Pembangunan suatu daerah dikatakan berhasil apabila terdapat peningkatan dalam pertumbuhan ekonominya yang tercermin dalam PDRB dan pendapatan per kapita. Namun, pertumbuhan ekonomi sering kali tidak menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dapat mengakibatkan meningkatnya angka penduduk miskin yang juga berpengaruh pada besarnya kesenjangan sosial. Hal ini karena ketidakmerataan dalam pembangunan ekonomi pada daerah tersebut.



Dalam penelitian ini, untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah di Pulau Kalimantan digunakan Indeks Williamson dengan besaran nilai nol sampai 1. Dimana semakin besar atau mendekati satu angka Indeks Williamson maka semakin lebar kesenjangan di wilayah tersebut, sebaliknya jika mendekati nol, artinya pembangunannya merata dan ketimpangannya rendah.

Untuk menekan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Kalimantan maka perlu diketahui faktor penyebab dari ketimpangan itu sendiri. Dimana diketahui beberapa faktor yang memengaruhinya adalah tingkat pengangguran, belanja daerah dan realisasi investasi asing di setiap wilayah di Pulau Kalimantan. Untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap ketimpangan dan dampaknya pada masing-masing wilayah, maka digunakan analisis data panel yang menggabungkan data *time series* dan *crossection*.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Kalimantan Tahun 2014-2023.
2. Diduga belanja daerah memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Kalimantan Tahun 2014-2023.
3. Diduga Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Kalimantan Tahun 2014-2023.





Optimized using
trial version
www.balesio.com